

ABSTRAK

PEMANFAATAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK BAGI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN WAY KANAN

Oleh
RATU MARINA PRATIWI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah, untuk mendukung PAD maka dibentuknya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam undang-undang tersebut lahir kebijakan khusus mengenai pajak rokok, disebutkan bahwa pajak rokok digunakan paling sedikit 50% untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum dibidang rokok. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah pemanfaatan alokasi dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Way Kanan? (2) Apa sajakah faktor-faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan pemanfaatan alokasi dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer, dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok yang diterima Kabupaten Way Kanan pada tahun 2017 adalah 14.058.799.362 dan dimanfaatkan 85% untuk pelayanan kesehatan umum serta penegakan hukum di bidang rokok sebesar 11.949.979.457, sedangkan 15% dari DBH pajak rokok tersebut digunakan untuk kepentingan umum lainnya di Kabupaten Way Kanan, Namun DBH pajak rokok sering mengalami keterlambatan pencairan, karena keterlambatan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran alokasi yang akan disalurkan ke pemerintah daerah, belum adanya Perda Kabupaten Way Kanan yang mengatur tentang pemanfaatan DBH pajak rokok, belum disediakannya sarana yang memadai bagi para perokok di segala kawasan, kurangnya pengawasan terhadap penjual rokok, dan anak di bawah umur dalam pembelian rokok serta warga sekitar yang masih merokok pada Kawasan Tanpa Rokok.

Kata kunci : Bagi Hasil Pajak, Pajak Rokok, Pemanfaatan Pajak Rokok

ABSTRACT

THE UTILIZATION OF ALLOCATION REVENUE SHARING FUND OF CIGARETTES TAX FOR THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH IN WAY KANAN REGENCY

**By
Ratu Marina Pratiwi**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) is one of the sources local revenue, to support the PAD then formed the Local Tax Law and Local Retribution Number 28/2009, in the legislation have specific policies regarding taxation of cigarettes, mentioned that tax cigarettes used at least 50% for the public health service and law enforcement in the field of smoking. Problems in the research was formulated: (1) how the utilization of allocation revenue sharing fund of cigarette tax for the ministry of public health in Way Kanan Regency? (2) what are the factors restricting Way Kanan Government Districts in the utilization of allocation revenue sharing fund of cigarette tax for the ministry of public health in Way Kanan Regency?

The approach used is the issue of legal normative and empirical approaches. Data type consists of primary data and secondary data, done with the study of the field and the study of librarianship.

Based on research results, PADcigarettes tax receivedin Way Kanan Regency in 2017 are 14.058.799.362 and utilized 85% (11.949.979.457) for public health services and law enforcement in the field of smoking , whereas 15% of the cigarette tax used for other public interests in Way Kanan Regency, but often the cigarette tax experience delays in disbursements, because of the delay in determining the magnitude of the Central Government appropriations that will be distributed to local governments, Yet the existence of District Regional Regulation set about the utilization of allocation revenue sharing fund of cigarette tax, has not provided the means for smokers, and a lack of supervision of minors in cigarette purchases and residents who are still smoking in Non Smoking Areas.

Keywords: Revenue Sharing Fund , Cigarettes Tax, The Utilization of Cigarettes Tax